

**Kelangsungan dan Perubahan Individualisme Amerika:
Kajian Tekstual dan Kontekstual terhadap Pidato Pelantikan
Presiden Franklin Delano Roosevelt**

**oleh:
Eko Rujito DA**

eko_rujito@uny.ac.id

ABSTRACT

This study examines Franklin Delano Roosevelt four inaugural addresses to find out the continuity change of American traditional value, namely individualism. This study is purely a library research based on textual interpretation of Franklin Delano Roosevelt inaugural addresses in revealing any continuity and change of American traditional value mentioned above.

Applying an interdisciplinary and holistic approach, the writer attempts to analyze the continuity change of American individualism values found in Franklin Delano Roosevelt's inaugural addresses in the socio-cultural, historical and biographical contexts.

This study begins with introductory notes, and then goes on to a discussion of the origins and significance of American individualism. The next part is a discussion on the continuity and change of American individualism found in Franklin Delano Roosevelt's inaugural addresses, both textually and contextually.

The study finds that there are continuity and change in the interpretation of American individualism expressed in Franklin Delano Roosevelt's inaugural addresses. These continuity and change are inevitably the result of the dynamic in economy, politic, and socio-cultural in America during the thirties and early forties.

Keywords: individualism-continuity-change

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan politik Amerika, saat dimana seorang presiden baru menyampaikan pidato pelantikan adalah momen yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat yang. Melalui pidato pelantikan inilah rakyat Amerika melihat prospek, potensi dan kapasitas presiden terpilih. Dalam sejarah bahkan banyak presiden Amerika yang tetap dikenang karena kalimat-kalimat yang

mereka ucapkan saat mereka menyampaikan pidato pelantikan mereka. Orang akan tetap mengingat ucapan presiden Abraham Lincoln “*With malice toward none, with charity for all*” yang ia ucapkan dalam pidato pelantikannya yang kedua, atau kalimat J.F. Kennedy “*ask not what your country can do for you--ask what you can do for your country*”, dan juga ucapan membakar semangat Franklin Delano Roosevelt “*the only thing we have to fear is fear itself*”. Orang mengingingit ucapan-ucapan itu bukan hanya karena terdengar puitis atau memiliki makna yang dalam, namun juga karena situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Ucapan Lincoln pada tanggal 4 Maret, 1865 di atas merupakan upaya menyatukan bangsa yang sempat terpecah akibat Perang Saudara. Orang mengingat kata-kata J.F.K. sebagai indikasi dari menguatnya kekuatan pemerintah federal serta merupakan refleksi dari kondisi social dan politik, terutama politik luar negeri, pada saat itu.

Ketika FDR berkata pada pidato pelantikannya yang pertama, “satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri” ia tahu persis apa yang sedang terjadi di Amerika pada saat itu. Sebuah krisis yang merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah Amerika sedang melanda dan mengguncang pondasi ekonomi, politik, sosial, bahkan cultural bangsa ini. Dalam situasi seperti itu Amerika membutuhkan seorang “hero” yang akan menyelamatkan hari, dan FDR maju ke depan memenuhi panggilan tersebut.

Keberhasilan FDR sebagai presiden Amerika dalam empat periode kepemimpinan telah dan akan tetap menjadi perdebatan. Banyak ahli, sejarawan, politikus, atau rakyat kebanyakan yang menilai bahwa FDR telah

berhasil membawa Amerika ke kehidupan yang lebih baik, mengatasi krisis, memperbaiki hubungan sosial warga Amerika, dan membawa Amerika keluar dari Perang Dunia II sebagai pemenang. Namun tidak sedikit pula yang mengkritik, bahkan mencemooh, bahwa FDR tidak membawa perbaikan yang berarti, krisis tetap terjadi bahkan hingga tahun 1939 ketika PD II pecahmeakan, dan yang paling serius, menurut mereka FDR telah merusak nilai-nilai Amerika yang selama ini menjadi kesadaran kolektif dan identitas budaya Amerika, salah satunya, dan yang paling penting, adalah nilai-nilai individualisme. Di bawah kepemimpinannya yang berani dan diselimuti dengan optimisme, istilah kebebasan dan individualisme tidak lagi berarti membiarkan individu sebebaskan mungkin mengatur kehidupan mereka sendiri, namun berarti memperluas kontrol sosial atas individu demi kemaslahatan bersama (Foerster, 1980:147). Di bidang politik perubahan ini ditandai dengan semakin besarnya peran Pemerintah Federal dalam mengatur kehidupan sehari-hari warga negara. Desentralisasi pemerintahan yang merupakan ciri paling mencolok dalam politik Amerika sejak era Revolusi kini berganti pemerintahan yang lebih sentralistis. Perluasan fungsi pemerintah di berbagai bidang ini dipandang oleh para kritikus sebagai hal yang akan membahayakan nilai-nilai Amerika yang paling mendasar, yaitu kebebasan rakyat Amerika (Cincotta, 1994:264).

Tulisan ini mencoba melihat kelangsungan dan perubahan, atau reinterpretasi, nilai-nilai individualisme dalam empat pidato pelantikan presiden FDR. Beberapa hal menjadi dasar dari kajian ini. Pertama, FDR

adalah satu-satunya presiden Amerika yang terpilih empat kali berturut-turut, sehingga merupakan satu-satunya presiden yang menyampaikan pidato pelantikan sebanyak empat kali. Kedua, individualism merupakan salah satu nilai Amerika yang paling mendasar dan dianggap sebagai identitas kultural dan karakter bangsa, sehingga perubahan maupun penafsiran ulang dari nilai ini akan memiliki dampak sosial, kultural, politik dan ekonomi yang signifikan. Ketiga, masa kepemimpinan FDR merupakan salah satu era dalam sejarah Amerika yang ditandai perubahan sosial bersekala massif dan berdampak jangka panjang sebagai dampak dari situasi yang luar biasa pada saat itu.

B. Asal-usul dan Signifikansi Individualisme Amerika

Individualisme sering dianggap sebagai inti dari kebudayaan Amerika, seperti yang dikatakan Bellah et al (1985:142), “Kita percaya akan kesakralan individu. Apapun yang melanggar hak kita untuk berpikir bagi diri kita sendiri, memutuskan bagi diri kita sendiri, menjalani kehidupan seperti yang kita ingini, tidak hanya salah secara moral, namun juga penindasan secara religius.....Karena merupakan elemen dasara dari keseluruhan budaya Amerika, menanggalkan individualism berarti mengingkari identitas terdalam Amerika.” Hal yang sama juga diungkapkan Richard H. Solomon dengan mengatakan, “Perspektif kultural Amerika tentu saja selalu memberikan penekanan pada pentingnya individu dalam masyarakat, tanggung jawab personal dan juga aktualisasi diri” (dikutip dalam Huntington, 1981: 52). Bagi

sebagian orang, individualism bahkan dianggap sebagai elemen yang membedakan Amerika dengan bangsa-bangsa lain. Di tahun 1925 Aldo Leopold menulis: “Jika kita memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai budaya Amerika, unsur yang membedakan kita (dengan bangsa lain) adalah sifat individualisme yang kuat. . . Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari apa yang kita sebut Amerikanisme, sifat yang membedakannya dengan bangsa lain, dan merupakan temuan bangsa Amerika dan sumbangan bagi peradaban” (dikutip dalam Kammen, 1980:270).

Kekhasan individualisme ini ditunjukkan dengan fakta bahwa penggunaan istilah ini pertama kali dalam *Oxford English Dictionary* berasal dari terjemahan karya Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (Glazer dalam Lohof (ed.), 1978:164). Argumen bahwa individualism merupakan temuan bangsa Amerika pertama kali diungkapkan oleh Alexis de Tocqueville, orang Eropa yang berkunjung ke Amerika di abad 18, yang begitu kagum dengan kondisi Dunia Baru yang sangat jauh berbeda dengan Eropa. “Individualisme merupakan sebuah ekspresi yang benar-benar baru yang kemudian melahirkan ide-ide baru yang lain” (Tocqueville, 1945:95). Ia bahkan mengatakan bahwa individualisme berbeda dengan sifat mementingkan diri sendiri, namun merupakan “sebuah perasaan dewasa dan tertata, yang mengatur tiap anggota masyarakat sedemikian rupa untuk memisahkan diri dari massa, dan setelah mereka membentuk sebuah lingkaran kecil bagi diri mereka sendiri, mereka akan membiarkan masyarakat mengatur diri mereka sendiri.” (Tocqueville, 1945:236).

Asal-muasal individualism Amerika selalu dikaitkan dengan para pendatang awal, yang diawali oleh orang-orang Pilgrim dan Puritan, yang menyeberangi lautan Atlantik menuju Dunia Baru. Di Dunia Baru yang sama sekali asing, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri serta kemampuan bekerjasama dengan orang lain agar dapat bertahan (Glazer, 1978:165, Clark, 1974: 126). Para imigran generasi selanjutnya juga melewati proses yang kurang-lebih sama. Kondisi alam pada saat itu memang cenderung menuntut kemampuan bertahan tiap orang dengan keahlian yang mereka miliki. Mereka harus membuka hutan, membuka dan mengelola lahan, atau bahkan mempertahankan diri dari serangan orang-orang Indian. Karena biasanya koloni terdiri dari desa-desa kecil yang tersebar, maka mereka harus mengandalkan pada kemampuan mereka sendiri (Gabriel, 1974:158). Kerasnya hidup inilah yang membuat para pionir tersebut menjadi individu-individu yang *self-sufficient* (Todd & Curti, 1972:60-61).

Pentingnya faktor alam ini dalam membentuk karakter para pionir juga diungkapkan oleh Slotkin. Menurutnya keadaan alam yang dihadapi para pionir tersebut merupakan kondisi material yang membentuk kebiasaan dan gagasan-gagasan para pionir (Slotkins, 1985:15). Dengan bergantung pada kemampuan mereka sendiri inilah mereka menentukan nasib mereka. Mereka adalah orang-orang individualis karena keberhasilan dan kegagalan sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dan keahlian mereka sendiri (Clark, 1974:126). Dalam istilah Tocqueville orang-orang ini “tidak berhutang pada siapapun; mereka memiliki kebiasaan untuk selalu menganggap mereka

berdiri di kaki mereka sendiri, oleh karena itu nasib mereka pun ada di tangan mereka sendiri” (dikutip dalam Glazer, 1978:164-165).

C. Individualisme dalam Politik

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari awal sejarah bangsa Amerika individualism telah menjadi elemen kultural terpenting yang memberikan identitas budaya bagi bangsa Amerika. Karakter individualistis para pionir, dalam artian kepercayaan terhadap kemampuan diri untuk mencapai tujuan, orang-orang ini cenderung untuk menolak segala bentuk otoritas dari luar, terutama pemerintahan. Mereka lebih memilih untuk mengelola segala urusan secara individual dalam komunitas-komunitas kecil dimana hak individu terjamin. Kondisi ini pada gilirannya membuat mereka curiga terhadap hampir semua bentuk pemerintahan, khususnya pemerintahan yang besar (Glazer, 1978:166). Jika memang harus terdapat pemerintah maka harus sebuah pemerintahan yang meletakkan kebebasan individu sebagai premis dasar seperti apa yang dikatakan oleh Turner : “Jadi para pionir, dengan mengikuti prinsip kebebasan individu untuk maju, meletakkan hak Negara (pemerintah) di bawah hak individu untuk maju dengan campur tangan seminimal mungkin dari negara (pemerintah)” (Turner, 1963:273).

Perkembangan gagasan tentang hak individu di hadapan Negara ini sejalan dengan pandangan filsuf Inggris abad 17 John Locke. Melalui bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690), Locke meletakkan pondasi bagi sistem pemerintahan modern yang disebut kontrak sosial. Pandangan Locke

mendapatkan sambutan antusias di Amerika, yang diwakili oleh Thomas Jefferson dan Thomas Paine. Bahkan *Declaration of Independence* yang ditulis oleh Jefferson merupakan “paraphrase” dari pernyataan Locke dalam *Two Treatises on Civil Government*. Jefferson lebih memilih sebuah pemerintahan yang terbatas yang akan menjamin kebebasan individu karena dia percaya bahwa pemerintahan yang terbaik adalah yang mengatur sesedikit mungkin (Gabriel, 1974:69).

Jika Jefferson bersikap kritis terhadap pemerintah, Thomas Paine cendeuing sinis. Kecurigaan dan sinisme Paine terhadap pemerintah ia ungkapkan sebagai berikut: “Kita diatur dari Washington kapan harus menabur benih, dan kapan harus memanen” (Foerster, 1980:36). Paine membuat sebuah dikotomi antara masyarakat dan pemerintah; masyarakat adalah untuk kebaikan bersama sedangkan pemerintah adalah sebaliknya. Dalam sebuah pamphlet yang di bulan Januari 1776 Paine menulis, “Masyarakat di semua Negara adalah sebuah berkah, yang terbaik sekalipun, adalah keburukan” (Paine, 1945:4-5).

Di abad 18 suara Jefferson dan Paine masih terdengar gaungnya dalam tokoh-tokoh seperti Ralph Waldo Emerson dan Henry David Thoreau. Pandangan mereka terutama dipengaruhi oleh filsuf Jerman Immanuel Kant. Bagi Kant fakta sosial yang paling sentral adalah individu yang bebas, dan sejarah dipandang sebagai sebuah perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani dimana didalamnya individu dianggap sebagai akhir dan hukum moral menggantikan kekuatan-kekuatan lain sebagai otoritas tertinggi (Foerster,

1980:51-53). Seperti halnya Jefferson dan Paine, Emerson juga memiliki kecurigaan terhadap pemerintah. Dalam essaynya yang berjudul *Politic* ia menulis, “Setiap Negara adalah korup. Orang baik seharusnya tidak terlalu patih pada hukum... kata *politik*, yang sejak dahulu bersinonim dengan licik, sehingga pemerintahan adalah sebuah tipuan (Emerson, 2001:280). Pemerintahan ideal bagi Emerson adalah sebuah “*self-government* yang akan membiarkan individu untuk menuruti keyakinan mereka sendiri” (Emerson, 2001:285). Thoreau adalah penerus Thomas Paine. Baginya pemerintahan yang baik adalah “ yang tidak mengatur sama sekali (Thoreau, 1993:279).

Pandangan para pionir Amerika abad 17 dan para pemikir abad 18 dan 19 telah meletakkan pandangan yang mengakar kuat dalam kesadaran dan sikap politik rakyat Amerika pada abad-abad selanjutnya hingga sekarang. Orang Amerika berpandangan bahwa negara smanifestasi kontrak sosial yang harus menjamin kebebasan individu dan dalam saat yang bersamaan melindungi hak-hak individu tanpa harus mencampuri terlalu dalam kehidupan tiap individu.

D. Reinterpretasi Nilai Individualisme dalam Pidato Pelantikan Presiden

FDR

Franklin Delano Roosevelt menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-32 setelah meraih kemenangan mutlak atas mantan preseiden sebelumnya Herbert Hoover pada pemilihan presiden tahun. Berpasangan dengan John Gardner dari Texas, FDR membawa kemenangan meyakinkan bagi Partai

Demokrat sejak Perang Saudara (Todd dan Curti, 1972:640). FDR kemudian terpilih kembali untuk tiga periode berikutnya sehingga merupakan satu-satunya presiden Amerika yang menjabat selama empat periode kepemimpinan.

Pidato pelantikan FDR yang pertama disampaikan pada hari Sabtu tanggal Maret 1933 di saat Amerika sedang mengalami krisis paling buruk dalam sejarah yang dikenal sebagai Great Depression. Jadi isi pidato pelantikannya didominasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan krisis, konsolasi bagi bangsa yang sedang terpuruk dan rancangan aksi untuk mengatasi krisis. Pidato pelantikan yang kedua disampaikan pada hari Rabu 20 Januari 1937. Pada saat pidato ini disampaikan Amerika masih belum pulih dari krisis, bahkan pada tahun 1937 dan 1938 krisis kembali melanda Amerika. Akhir periode pertama ditandai dengan berbagai kritik terhadap pemerintahannya, termasuk dari tokoh-tokoh penting di tubuh Partai Demokrat sendiri, sehingga isi pidato pelantikan yang kedua ini sebageian besar berisi jawaban FDR terhadap berbagai kritik tersebut.

Ketika FDR menyampaikan pidato pelantikannya yang ketiga pada hari Senin, 20 Januari 1941 Amerika sedang mengamati dengan cemas konflik antara kekuatan-kekuatan di dunia yang dikenal sebagai Perang Dunia II, sehingga dalam pidatonya FDR mengingatkan bangsa Amerika tentang kemungkinan dan ancaman perang di tanah mereka. Dalam kesempatan ini ia juga mengungkapkan keyakinannya tentang demokrasi dan kemampuan bangsa Amerika menghadapi ujian. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 1945

FDR menyampaikan pidato pelantikannya yang keempat ketika Perang Dunia II sedang mencapai puncaknya, terutama di Eropa. Dalam pidatonya FDR mengungkapkan keyakinan dan harapannya tentang tatanan dunia yang damai. Namun demikian, FDR tidak sempat melihat akhir Perang Dunia II dan kemenangan pihak sekutu. Ia meninggal dunia secara mendadak pada tanggal 12 April, 1945 setelah pengabdian yang begitu lama dan menyita energy dan pikirannya.

Pemerintahan FDR selama empat periode adalah masa-masa dimana Amerika mengalami transformasi tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak jangka panjang. Sebagian dari transformasi tersebut bersifat gradual, namun sebagian yang lain begitu drastis. Sejak awal pemerintahannya sikap FDR sangat jelas; membela kaum lemah dan membatasi kaum kalangan atas, atas nama keadilan. Karena sikap inilah kemudian banyak pihak, terutama dari Partai Republik dan para industrialis memusuhi dan melancarkan kritik bertubi-tubi. Dalam pandangannya krisis yang menimpa Amerika pada saat itu adalah akibat terdapat akumulasi kekayaan dan distribusi yang tidak merata. Dalam sebuah pidato di *Commonwealth Club* di San Francisco pada tanggal 23 September 1932, FDR mengatakan, "Pandangan sekilas terhadap situasi yang terjadi saat ini secara jelas menandakan bahwa kesetaraan kesempatan seperti yang dahulu kita miliki sudah tidak ada lagi. Pabrik-pabrik dan industri telah kita bangun. Masalahnya sekarang adalah apakah industri kita sudah kita bangun secara berlebihan. ... dalam bahasa yang sederhana, kita sedang menuju kea rah

tatanan ekonomi oligarkis, atau bahkan kita sudah seperti itu” (Roosevelt dalam Hofstadter, 1959:347-349). Ia memberikan bukti terhadap apa yang ia yakini: “Sebuah studi terkini terhadap konsentrasi bisnis di Amerika menunjukkan bahwa perekonomian kita dikuasi oleh sekitar 600 perusahaan yang mengendalikan dua per tiga industri Amerika. Sedangkan sepertiganya dibagi oleh sepuluh juta bisnis skala kecil yang lain” (Roosevelt dalam Hofstadter, 1959:348).

Kondisi di atas berakibat pada kesenjangan pendapatan. Catatan statistik tentang distribusi pendapatan di tahun 20-an menunjukkan kesenjangan yang luar biasa. Data Biro Sensus Amerika dari tahun 1920 hingga 1929 menunjukkan bahwa sekitar 26 hingga 32 persen pendapatan nasional dimiliki oleh 1 persen dari keseluruhan populasi dan 12 hingga 19 persen dimiliki oleh 5 persen, dan sisanya dibagi untuk 94 persen populasi (dikutip dalam Lee dan Passel, 1979:339).

Sejak awal pandangan FDR tentang individualisme selalu berkaitan dengan keadilan ekonomi. Dalam pidato yang sama ia mengemukakan gagasannya tentang individualism dan keadilan ekonomi jika ia terpilih menjadi presiden, “Jika, selaras dengan prinsip ini, kita harus membatasi operasi para spekulator, manipulator, atau bahkan para bankir, saya yakin kita harus menerimanya, bukan untuk menghancurkan individualism, tapi justru untuk melindunginya” (Roosevelt in Hofstadter, 1959:350). Monopoli dan oligarki atas nama hak individu untuk maju dan memperoleh kemakmuran telah menjadi kekuatan yang tidak terkendali dan tidak

bertanggungjawab yang telah “menggerogoti kekuatan politik dan kehidupan individu” (Roosevelt dalam Hofstadter, 1959:347). Dalam kondisi seperti ini FDR menganggap bahwa kesempatan tidak lagi setara, dan kekuatan industri yang tidak terkendali akan mengancam kebebasan ekonomi individu untuk mencari penghidupan.

Apa yang ia sampaikan dalam pidato di *Commonwealth Club* sebenarnya memberikan indikasi yang jelas tentang kebijakan pemerintahan FDR dalam mengatasi krisis ketika ia terpilih menjadi presiden; perluasan peran pemerintah, terutama pemerintah federal, reevaluasi hubungan individu dan negara, dan reinterpretasi nilai individualisme. Kalangan Republik dan konservatif merasa tersentak, dan kalangan radikal dan progresif bersiap menyambut era baru dalam sejarah Amerika.

Ketika menduduki kursi kepresidenan FDR menjajikan bahwa kebijakan pemerintahannya akan lebih “sederhana, dan tidak sedrastis pemerintahan presiden Theodore Roosevelt dan Wilson.” Akan tetapi, dalam kenyataannya masa pemerintahan FDR menandai sebuah perluasan intervensi pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan, bahkan yang terbesar dalam sejarah Amerika. Segera setelah ia menghuni Gedung Putih, berbagai badan federal dan puluhan undang-undang dibuat di bawah bendera *New Deal* untuk mengatasi krisis. Salah satu yang terpenting adalah NIRA (National Recovery Administration) dimana di dalamnya terdapat undang-undang yang menjamin hak-hak buruh untuk berserikat dan berunding dengan pengusaha.

Salah satu langkah yang paling mendesak adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 12 juta pengangguran, sebagian besar dari mereka dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintahan FDR mendirikan FERA (Federal Emergency Relief Administration) di bulan Mei 1933 untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat krisis.

Semua program tersebut dibawah kendali dan dibiayai oleh pemerintah federal. Dalam pidato pelantikannya yang pertama FDR telah mengisyaratkan bahwa ia akan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis dan dampak yang ditimbulkan. Dalam pidatonya ia secara tegas menyatakan bahwa pemerintah akan menjadi unsur utama dalam penanggulangan krisis, baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun penyandang dana:

Tugas kita yang mendesak adalah membuat rakyat kita bekerja kembali. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil jika kita menghadapinya dengan bijaksana dan berani. Hal ini dapat dilakukan dengan perekrutan langsung oleh Pemerintah, menganggap tugas ini seperti halnya kita dalam keadaan darurat perang ... Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan secara nasional dan pengawasan terhadap semua fasilitas dan layanan publik.

Dia meyakinkan rakyat Amerika bahwa campur tangan pemerintah akan sangat diperlukan karena “Berulang kali kita melakukan upaya mengatasi berbagai masalah tanpa bantuan pemerintah, dan hasilnya kebingungan dan kekacauan. Tanpa bantuan pemerintah kita tidak mampu menciptakan kontrol moral terhadap ilmu pengetahuan, hal ini perlu karena ilmu pengetahuan seharusnya menjadi pelayan, bukan justru penguasa yang

kejam bagi umat manusia” (Pidato Pelantikan pertama). Ia melihat bahwa situasi terkini menuntut sebuah “kebutuhan yang mendalam—kebutuhan untuk menemukan cara-cara mencapai tujuan kolektif agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi tiap-tiap individu dalam sebuah peradaban yang semakin kompleks” (Pidato Pelantikan pertama). Ia bahkan meminta rakyat untuk “bertindak layaknya prajurit yang terlatih yang rela berkorban demi terciptanya kedisiplinan bersama, karena tanpa kedisiplinan seperti itu tidak akan ada kemajuan yang dapat dicapai, tidak akan ada pemerintahan yang efektif ” (Pidato Pelantikan pertama).

Dalam pandangan FDR sebuah pemerintahan yang kuat dan efektif merupakan jawaban dari segala masalah yang di hadapi Amerika pada saat itu. Untuk memberikan pembenaran terhadap pandangannya tersebut ia membandingkan situasi yang dihadapi Amerika saat itu dengan kondisi yang dihadapi oleh para pendiri bangsa di masa Perang Revolusi. Ia mengatakan hal ini dalam pidatonya:

Dalam Konvensi tersebut, para pendiri bangsa kita menemukan cara untuk mengeluarkan bangsa ini dari kekacauan yang mengikuti Perang Revolusi; mereka menciptakan sebuah pemerintahan yang kuat yang memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan terpadu untuk menyelesaikan segala persoalan yang tidak dapat diatasi secara individual maupun local. Hari ini kita memerlukan kekuasaan seperti itu untuk mencapai tujuan yang hampir serupa. ... Hampir semua dari kita memahami bahwa ketika hubungan antar manusia semakin kompleks, maka kekuasaan untuk mengatur juga harus semakin kuat—kekuasaan untuk menghentikan segala kejahatan, kekuasaan untuk melakukan kebaikan (Pidato Pelantikan kedua).

Unutuk mencapai tujuan ini ia mengingatkan rakyat Amerika untuk bersiap meninggalkan politik tradisional, dan pemerintahannya akan melakukan upaya tersebut jika keadaan benar-benar membutuhkan. Masih dalam pidato pelantikannya yang pertama, ia menyatakan, “Kita mengharapkan bahwa keseimbangan kekuasaan yang normal antara otoritas eksekutif dan legislatif dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di depan kita. Namun sebuah kondisi yang tidak kita perkirakan sebelumnya serta upaya-upaya yang sangat mendesak keseimbangan otoritas seperti itu”. Secara lebih eksplisit FDR menyatakan pandangannya dalam kutipan pidato di bawah ini:

Saya siap, di bawah tugas konstitusional, untuk memerintahkan langkah-langkah drastis yang diperlukan dalam keadaan darurat seperti yang kita hadapi sekarang. Langkah-langkah ini akan saya jalankan dalam kerangka otoritas yang diberikan oleh konstotusi Namun jika Kongres gagal melakukan langkah-langkah yang, dan jika keadaan nasional sudah sangat darurat, saya tidak akan mundur selangkah pun dari tugas-tugas yang menghadang saya. Saya akan meminta satu hal kepada Kongres untuk mengatasi krisis—kekuasaan eksekutif yang luas untuk menanggulangi keadaan darurat, sebesar wewenang yang akan diberikan kepada seorang presiden ketika Negara dalam keadaan perang atau diinvasi oleh musuh dari luar (Pidato Pelantikan pertama).

Seiring jalannya waktu, sebagian rakyat Amerika, terutama orang-orang dari partai Republik mulai gelisah dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintahan FDR dalam mengatasi persoalan bangsa. Mereka menuduh bahwa langkah-langkah pemulihan dalam New Deal telah menciptakan sedemikian besar birokrasi federal yang tidak diperlukan dan memperbesar

kekuasaan pemerintah hingga pada titik mengintervensi hak-hak warga negara (Ver Steeg & Hofstadter, 1978:671-672). Bahkan menurut para pengkritik New Deal, langkah-langkah tersebut jika dilanjutkan akan menghancurkan individualism Amerika (Hofstadter et al., 1959:519). Campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan public akan membuat rakyat semakin tergantung kepada pemerintah dan kehilangan inisiatif mereka sebagai individu yang bebas. Penulis seperti Albert J. Nock, yang mendukung desentralisasi dan masyarakat individualistis, mengkritik bahwa formula pemulihan yang ditawarkan pemerintahan FDR merupakan “penghisapan semua energi dan upaya spontan oleh negara”, dan merupakan sebuah kemunduran (Curti, 1964:722). Bahkan terhadap program-program sosial, kalangan konservatif memandangnya sebagai upaya yang harus ditentang. Dalam pandangan mereka bantuan pemerintah adalah sesuatu yang immoral karena hal itu berarti menghilangkan kemampuan individu untuk bergantung pada kemampuan mereka sendiri, meberikan bantuan barang dan jasa secara cuma-cuma adalah sebuah perampokan terhadap inisiatif individu (Klatch dalam Wolfe (ed.), 1991:363-369).

Pada awalnya kritik dilontarkan oleh mereka yang berasal dari lapisan ekonomi atas, orang-orang kaya, para pengusaha, industrialis dan pejabatnegara dari kalangan konservatif. Namun jutuaan orang kemudian mulai memiliki pandangan yang sama akan adanya sebuah ancaman yang serius dalam formula yang ditawarkan oleh pemerintahan FDR. Mereka khawatir moral rakyat akan melemah dan inisiatif mereka akan hilang. Mereka

berpendapat bahwa bantuan spontan dari individu maupun kelompok lebih baik dan lebih bisa diandalkan dalam kondisi seperti itu; sementara yang lain harus menolong diri mereka sendiri seperti yang telah dilakukan oleh rakyat Amerika sejak awal berdiri sebagai bangsa (Curti, 1964:718). Sedangkan bagi kalangan konservatif percaya bahwa satu-satunya jaminan bagi masa depan Amerika adalah pasar bebas, inisiatif individu, bergantung pada kemampuan sendiri dan kerja keras dengan campur tangan Negara sekecil mungkin (Klatch dalam Wolfe (ed.), 1991:363-364).

Para pengkritik New Deal melihat bahwa individualisme yang selama ini telah menjadi identitas budaya Amerika berada dalam ancaman yang serius. Newton D. Baker mengecam hilangnya sifat percaya pada kemampuan sendiri yang telah menjadi keyakinan orang Amerika sejak para pionir dan digantikan oleh tanggung jawab negara terhadap individu; “matinya keluhuran moral akan menyebabkan bencana”, begitu kata Baker (Curti, 1964:722). Di tahun 1928, dalam sebuah pidatonya, presiden Herbert Hoover, presiden sebelum FDR, telah mengingatkan bahwa sentralisasi pemerintahan akan berakibat pada “penghilangan inisiatif dan upaya, sebuah nilai yang telah membuat kita menjadi bangsa yang besar” (Hoover dalam Hofstadter, 1959:399). Dia menolak intervensi pemerintah dalam bidang bisnis karena hal itu akan “menghancurkan inisiatif dan kreatifitas, menghambat tumbuhnya jiwa kepemimpinan, menghancurkan energy mental dan spiritual dari rakyat kita” (Hoover dalam Hofstadter, 1959:341).

Para pengkritik umumnya merasa terganggu dengan intervensi New Deal dalam bidang bisnis. Dalam pidato pelantikannya yang pertama dan kedua jelas terlihat bahwa FDR memandang kalangan bisnis (terutama yang berskala besar) sebagai kekuatan antagonis yang merugikan kepentingan rakyat banyak dan memiliki andil yang besar dalam terjadinya krisis yang berkepanjangan. Ia mengatakan, “praktek-praktek para pebisnis besar bertentangan dengan opini public, dan bertentangan dengan hati dan pikiran sehat manusia” (Pidato Pelantikan pertama). Ia bahkan menyebut para pebisnis sebagai “generasi yang mementingkan diri sendiri.” Oleh karena itu, ia mendesak adanya sebuah upaya untuk mengakhiri praktek perbankan dan bisnis yang selama ini hanya merupakan upaya mementingkan diri sendiri yang dibungkus dengan slogan individualism dan *self-reliance* (Pidato pelantikan pertama). Dalam pidato pelantikannya yang kedua ia meyakinkan rakyat Amerika bahwa “kita harus menciptakan alat kontrol yang efektif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi yang membabi buta serta terhadap orang-orang yang mementingkan diri sendiri.”

FDR mengingatkan bahwa para pebisnis dan kalangan konservatif terlalu sering menggunakan istilah individualisme untuk memberikan pembenaran terhadap sifat serakah dan mementingkan diri sendiri. Mereka tidak menginginkan intervensi pemerintah ketika kondisi usaha dan ekonomi sedang bagus. Namun, ketika situasi berubah menjadi buruk langkah pertama yang mereka ambil adalah meminta bantuan pemerintah. Dalam sebuah pidato di *Commonwealth Club* FDR mengatakan:

Selama beberapa waktu terdapat doktrin bahwa pemerintah seharusnya tidak ikut terlibat dalam bisnis dan bersaing dengan bisnis swasta, terdapat juga kepercayaan, terutama di kalangan Republik, bahwa untuk kepentingan dunia bisnis, pemerintah harus menyerahkan semua urusan bisnis kepada masyarakat bisnis sendiri ... Orang yang sama yang mengatakan kepada anda bahwa ia tidak ingin melihat pemerintah mencampuri dunia bisnis—dan ia sungguh-sungguh dengan ucapannya serta memiliki alasan yang bagus untuk mengatakan hal itu—adalah orang pertama yang datang ke Washington dan meminta pemerintah untuk memberlakukan *prohibitory tariff* pada produk perusahaannya ... Ketika situasi menjadi semakin buruk—seperti yang mereka lakukan dua tahun lalu—ia akan bergegas menghadap Pemerintah Amerika Serikat dan memohon pinjaman (Roosevelt dalam Hofstadter, 1959:346).

D tengah kritik yang menuduh pemerintahannya telah menyebabkan melemahnya nilai tradisional Amerika, yaitu individualisme, FDR dengan lantang mengatakan bahwa apa yang ia dan puyok New Deal-nya lakukan bukanlah untuk menyerang nilai individualism, melainkan keserakahan dan sifat mementingkan diri-sendiri yang pada kenyataannya telah menhakitakan runtuhnya perekonomian Negara. Dalam pidato pelantikannya yang kedua ia mengatakan, “Kita tahu bahwa sifat mementingkan diri sendiri bertentangan dengan nilai-nilai moral; kita juga tahu bahwa hal itu adalah prinsip ekonomi yang buruk.” Bahkan dalam pidato pelantikannya yang ketiga FDR masih memegang teguh idealisme ini dengan mengatakan, “Harapan bangsa ini selamanya tidak akan pernah mentolelir kemiskinan yang tidak seharusnya maupun hasrat untuk menumpuk kekayaan demi kepentingan sendiri.” Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi yang ia lakukan diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi perekonomian, namun juga moralitas, yaitu

mengakhiri segala bentuk praktek-praktek yang tidak sehat dalam dunia bisnis. Ia menguraikan pandangannya dalam penggalan pidato berikut ini:

Pelajaran yang kita eroleh dari runtuhnya bangunan kemakmuran yang selama ini kita banggakan, yang oleh para penggasnya dianggap sebagai buah dari kepraktisan, adalah keyakinan bahwa pada akhirnya moralitas dalam ekonomi akan menang. Kita akan mulai menghilangkan garis yang memisahkan antara yang praktis dengan yang ideal; dan dalam pelaksanaannya kita akan menciptakan sebuah piranti kekuasaan yang tidak terbayangkan sebelumnya demi terwujudnya dunia yang lebih baik secara moral ... Pemahaman baru ini akan mengindarkan kita dari pemujaan akan kesuksesan dan kekayaan duniawi. This new understanding undermines the old admiration of worldly success as such. Mulai saat ini kita harus menanggalkan sikap tenggang rasa kita terhadap mereka yang menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk meraih keuntungan pribadi (Pidato Pelantikan kedua)

FDR berkali-kali menyebutkan pentingnya reformasi dalm pidato pelantikannya. Secara spesifik yang ia maksud dengan reformasi moral adalah perubahan pandangan hidup yang mengagungkan kekayaan duniawi menuju ke sikap yang menghargai nilai-nilai sosial yang lebih tinggi demi tercapainya masyarakat yang lebih sehat. Dalam kalimat pembukaan pidato pelantikannya yang pertama FDR mengatakan, “Dengan semangat bersama kita menghadapi cobaan yang menimpa bangsa kita saat itu. Namun demikian, kita masih bisa bersyukur karena ujiian ini hanya menyangkut hal-hal yang bersifat materi.” Dalam pidato yang sama ia juga mengatakan, “Ukuran keberhasilan dari upaya (pemulihan) ini terletak pada sejauh mana kita mampu meletakkan nilai-nilai sosial itu jauh lebih lebih mulia daripada sekedar keuntungan materi”, dan juga “Kebahagiaan tidak terletak hanya pada kepemilikan uang; namun pada kenikmatan akan sebuah pencapaian,

pada gairah akan upaya kreatif. Kebahagiaan serta sisi moral dari bekerja seharusnya tidak boleh dilupakan hanya karena kita mengejar keuntungan sesaat.” Oleh karena itu, ia berani menyimpulkan bahwa apa yang telah diraih oleh pemerintahannya selama empat tahun pertama dapat dilihat dari adanya “perubahan aspek moral Amerika yang terbesar” (Pidato Pelantikankedua). Begitu dalamnya ia percaya akan pentingnya reformasi moral sehingga ia mengatakan dalam pidato pelantikannya yang ketiga, “Dengan perubahan dalam iklim moral kita dan kemampuan kita untuk memperbaiki tatanan ekonomi kita, sebenarnya kita telah menjejakkan kaki kita ke jalan kemajuan hingga masa yang akan datang.”

Tuntutan akan pentingnya reformasi moral Amerika pada kenyataannya bukan hanya sesuatu yang diyakini oleh FDR dan pemerintahannya. Beberapa tokoh terkemuka dari berbagai bidang juga menyerukan hal serupa. Nilai-nilai lama yang selama ini menjadi acuan rakyat Amerika mulai dipertanyakan. Dengan dipimpin oleh George S. Counts, sekelompok pendidik mendesak terciptanya karakter masyarakat Amerika yang lebih bersifat kolektif. Para pendidik ini mengkritik sekolah-sekolah konvensional, dan bahkan banyak dari sekolah “progresif” yang terlalu memandang para siswa sebagai individu terpisah, dengan sedikit atau tanpa ajaran akan pentingnya masyarakat yang kolektif (Curti, 1964:712). Kelompok pendidik yang lain dipimpin oleh Robert Hutchin, rektor University of Chicago. Kelompok ini menyoroti kehidupan Amerika memberikan penekanan yang terlalu besar pada nilai-nilai material, kepentingan individu, dan humanitarianisme demokratis

dalam bentuk yang lunak. Anggota kelompok ini percaya bahwa pendidikan seharusnya melatih pria dan wanita dengan hal-hal yang mereka sebut prinsip-prinsip agung yang merupakan warisan pengalaman sejarah, seperti konsep moralitas, kebenaran dan keindahan; pendidikan harus mengajarkan manusia untuk tidak menganggap prinsip-prinsip tersebut tidak lebih penting dari nilai-nilai dan kebutuhan pragmatis (Curti, 1964:712).

FDR membaca fenomena ini dengan baik dan memendangnya sebagai dukungan moral yang perlu dimanfaatkan. Menurutnya kebijakan pemerintahannya tidak mencoba menghapus nilai individualisme dari tanah Amerika. Ia memberikan penafsiran ulang terhadap pemaknaan nilai individualism dengan menambahkan sesuatu yang dilupakan oleh Amerika saat itu, bahwa individu tanpa individu yang lain tidak akan pernah ada artinya. Ia mengatakan hal ini dalam pidato pelantikannya yang kedua, “Jika kita melihat situasi moral dan emosional rakyat kita saat ini secara seksama, kita akan segera melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita sadari, ketergantungan kita satu dengan yang lain; bahwawa kita tidak bias selamanya meinta, namun juga harus member.. (Pidato Pelantikan kedua)

Ketika FDR menekankan pentingnya sikap kolektif dan saling member dan menerima, ia sebenarnya menggaungkan kembali pandangan Thomas Jeferson hamper satu setengah abad sebelumnya. Dalam pidato pelantikannya Jefferson mengajak rakyat Amerika untuk “kembali kepada hubungan sosial yang penuh harponi dan sikap saling membutuhkan, karena tanpa hal itu kebebasan, bahkan hidup itu sendiri, akan terasa hampa.” Sikap dan

pandangan FDR sebenarnya adalah sebuah seruan untuk kembali kepada nilai individualism yang asli, yang diwariskan oleh para imigran pertama dan para pionir. Para penduduk awal Amerika adalah orang-orang yang individualis, namun di saat yang sama juga kooperatif (Clark, 1990:119, White, 1939:30). Mereka adalah individu-individu yang dengan inisiatif dan usaha sendiri memasuki alam liar, membuka lahan, mendirikan pondok-pondok dan mengelola lahan, namun mereka juga tidak segan untuk membantu tetangga mereka, kapanpun dibutuhkan. Ralph Barton Perry menyebut sikap ini sebagai *collective individualism* dan menjelaskannya sebagai berikut:

Sikap bergantung pada kemampuan sendiri orang Amerika sebenarnya adalah jamak dan kolektif—bukan “Aku bisa” tapi “Kita bisa”. Namun tetap saja individualistis—sebuah kebersamaan dari yang banyak dan bukan pengasingan yang satu, atau penyerapan semuanya ke dalam kesatuan yang lebih besar. Istilah yang tepat adalah bukan “organisme” melainkan “organisasi”; organisasi ad hoc, yang didirikan secara temporer dan spontan untuk menghadapi keadaan darurat, dan sekaligus organisasi majemuk di mana didalamnya individu-individu bergabung dan menyerahkan diri mereka untuk kepentingan bersama (dikutip dalam Kammen, 1980:115-116).

Sangat menarik bahwa FDR memang jarang sekali menggunakan kata ganti “Saya” dan pidatonya, dan lebih sering menggunakan “Kita”, walaupun ketika ia merujuk pada dirinya sendiri. Ini menunjukkan dan memberikan pesan secara verbal Amerika kepada rakyat bahwa mereka, seluruh rakyat dan pemerintah, adalah satu kesatuan demi terwujudnya tujuan bersama. Bandingkan, misalnya dengan pidato mantan presiden George W. Bush yang didominasi personalisasi “Saya”. Dalam sebuah pernyataan yang lebih

eksplisit, FDR menyatakan keyakinannya akan individualism kolektif sebagai berikut: “Hari ini, dalam sebuah peradaban yang berubah secara tiba-tiba, kita terberkahi dengan nilai-nilai luhur yang telah diyakini sejak para pendahulu kita. Dalam mengejar ambisi pribadi, kita adalah dan boleh individualis. Namun dalam upaya untuk mencapai kemajuan politik dan ekonomi sebagai sebuah bangsa, kita akan jaya atau binasa, sebagai satu bangsa” (Pidato pelantikan kedua). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa reformasi moral, khususnya untuk melihat dan mau peduli dengan sesama rakyat Amerika, adalah sesuatu menjadi salah satu sasaran pemerintahan FDR. Menilai pencapaian New Deal, Hofstadter et al (1959:516) menyimpulkan bahwa, “Di atas segalanya, terdapat pencapaian dari sisi kemanusiaan. Orang Amerika tidak akan lagi membiarkan orang Amerika yang lain kelaparan di tengah-tengah kemewahan sekelompok orang. Mereka juga tidak akan membiarkan saudara sebangsa mereka menderita karena hilangnya hara diri.”

Semua jawaban dan argumentasi FDR tentu saja tidak dapat memuaskan mereka yang selama ini mengritik pemerintahannya. Para pengritik terus-menerus mengecam New Deal sebagai ancaman terhadap “American way of life” (Curti, 1964:721). Kakangan konservatif yang selama ini berpegang pada tradisi menolong diri sendiri (self-help) dan bantuan non pemerintah merasa terusik dengan campur tangan pemerintah dalam dunia usaha. Namun FDR selalu memiliki jawaban untuk keberatan-kebaratan seperti itu. Ia mengatakan bahwa para pengusaha (konervatif) adalah para “hipokrit” yang menggunakan nilai-nilai luhur tradisional Amerika sebagai

tameng praktek kotor mereka. Satu hal lagi, kaum konservatif tidak menyadari bahwa tuduhan mereka tuduhkan kepada pemerintahan FDR yang telah membahayakan nilai individualism sebenarnya tidak berdasar. Menurut Merle Curti (1964:722) orang-orang ini tidak menyadari bahwa nilai-nilai lama yang yang terkait dengan individualism, seperti “kebebasan”, self-reliance, dan inisiatif individu, sebenarnya telah hilang dan kehilangan maknanya, jauh sebelum era New Deal, ketika perekonomian Amerika menjadi semakin terkonsentrasi kepada segelintir orang.

Kritik juga datang dari kalangan liberal dan semi-liberal, kelompok yang dulunya merupakan pendukung FDR, yang melihat New Deal sebagai “humanitarianisme emosional, diperparah dengan sikap politiknya yang berlebihan” (Thompson dikutip dalam Curti, 1964:722). Di pihak lain, para pendukung New Deal tetap meyakini bahwa program ini justru melindungi nilai individualisme dan mengurangi ketergantungan rakyat terhadap pemerintah dengan cara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bertahan dan meraih kemajuan dalam sebuah situasi yang keras (Hagberg, 2004: 27). Mereka beralasan bahwa campur tangan pemerintah tidak hanya akan menjaga perekonomian tetap sehat, namun juga memberikan perlindungan kepada rakyat dari kesulitan ekonomi (Sullivan, 1996:24). Pertentangan argument tentang apakah pemerintahan FDR dengan New Deal nya telah mematikan nilai individualism akan tetap panjang dan tanpa titik temu, karena masing-masing pihak berpijak dari perspektif yang berbeda. Namun demikian, menurut Curti (1964:718) akan cukup adil mengatakan

bahwa keadaan pada saat itu memang membutuhkan langkah-langkah yang berada di bawah kendali dan dilaksanakan oleh pemerintah federal, untuk mengupayakan jalan keluar yang lebih bersifat kooperatif daripada pola-pola individualis.

E. Penutup

Setiap era memiliki tantangan yang bersifat situasional yang sering kali sangat berbeda dengan era atau sesudahnya. Seorang presiden adalah pemegang kendali utama pemerintahan, dan lebih dari itu, merupakan simbol negara kepadanya rakyat menaruh harapan masa akan depan mereka, dan masa depan bangsa. Ketika seorang presiden mengucapkan pidato pelantikannya, sebenarnya ia sedang mendeskripsikan kualitas kepribadian, prinsip, serta kemampuan meyakinkan rakyat akan kepantasannya memegang kendali kepemimpinan. Oleh karena itu, pidato pelantikan bukan hanya sebuah rutinitas politik tanpa makna, sebagai pelengkap sah nya seorang presiden untuk memulai masa pemerintahannya. Dalam pidato itu akan tersurat visinya sebagai pemimpin serta kemampuan menjawab tantangan yang dihadapi bangsa.

Pidato-pidato presiden FDR, secara tekstual, memiliki beberapa keistimewaan dalam hal mencerminkan sikap dan visinya sebagai presiden, terlepas dari apakah sikap itu merupakan sesuatu yang tepat dan dibutuhkan oleh rakyat Amerika pada saat itu. Semua teks pidato FDR mudah dicerna, terdengar akrab dan menyentuh hal-hal yang riil, bukan hanya ujaran

normatif yang sulit dibantah. Terdengar hangat karena FDR jarang sekali memakai kata ganti “saya”, melainkan “kita.” Hal ini membuat rakyat Amerika merasa dilibatkan dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis, dengan begitu *sense of belonging* rakyat juga bterakomodasi.

Individualism memegang peran sentral dalam diskursus budaya, bahkan hampir dalam semua aspek kehidupan, Amerika. Bangsa Amerika percaya bahwa nilai inilah yang membedakan mereka dengan bangsa lain dan nilai yang dianut rakyat ini pulalah yang telah membuat Amerika menjadi negara yang besar dan maju. Oleh karena itu, segala bentuk upaya yang dianggap akan mengancam eksistensi nilai ini pasti akan mendapat penentangan yang keras. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, nilai itu juga telah digunakan sebagai pembenaran oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi, terutama dalam bidang ekonomi. Bagi mereka individualisme bermakna kebebasan mewujudkan ambisi pribadi tanpa mempertimbangkan kewajiban moral sebagai mahluk bermasyarakat. Hal inilah sebenarnya yang menjadi perhatian dan keprihatinan FDR sehingga ia membuat kebijakan-kebijakan dalam New Deal, yang dalam banyak hal memang “memusuhi” kaum industry dan pebisnis. Namun, sebenarnya FDR hanya ingin mengembalikan sifat kooperatif dan saling peduli rakyat Amerika, sebuah elemen yang dalam sejarahnya juga sangat esensial dalam nilai individualism Amerika, individualism yang bersifat kolektif.

Daftar Pustaka

- Bellah, Robert N., Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler, Steven M. Tipton, 1985. *Habit of The Heart: Individualism and Commitment in American Life*. Berkley, Los Angeles: University of California Press.
- Cincotta, Howard (ed.). 1994. *An Outline of American History*. United States Information Agency.
- Clath, Rebecca, 1991. "Complexities of Conservatism: How Conservatives Understand the World" in Wolfe, Allan (ed.), 1991. *America at Century's End*. Barkley, Los Angeles: University of California Press.
- Clark, Thomas D., 1974. *The Great American Frontier A History of Western Pioneering*. Connecticut: Greenwood Press.
- Clough, S., 1960. *Basic Values of Western Civilization*. New York: Columbia University Press.
- Curti, Merle. 1964. *The Growth of American Thought*, Third Edition. New York: Harper and Row Publisher.
- Emerson, Ralph Waldo, 2001. *Essays and Poems*. Vermont: Everyman Library.
- Foerster, Norman, 1980, *Image of America: Our Literature from Puritanism to Space Age*, Notre Dame, London: University of Notre Dame Press.
- Gabriel, Ralph H., 1974. *American Values: Continuity and Change*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Glazer, Nathan, "Equality and Individualism in the United States" in Lohof, Bruce A. (ed.), 1978. *Through the Eyes of the World: International Essays in American Studies*, Delhi: The Macmillan Company of India Limited.
- Hagberg, Sarah. 2004. "A Critique of the History of American Welfare as a Determining Factor for Contemporary Attitudes towards Welfare and Social Policies". http://tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/sp/spsba01_W98_1/denver5.htm
- Hofstadter, Richard, William Miller, and Daniel Aaron. 1959. *The American Republic*. Vol. 2. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Hofstadter, Richard, (ed). 1959. *Great Issues in American History: A Documentary Record*. New York: Vintage Books
- 1966, *Anti-Intellectualism in American Life*, New York: Knopf.
- 1968. *The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington*. New York: Knopf.
- Hoover, Herbert. 1928. "Rugged Individualism" in Hofstadter, Richard (ed.), *Great Issues in American History: A Documentary Record*. New York: Vintage Books.
- Huntington, Samuel P, 1981. *American Politics: The Promise of Disharmony*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Kammen, Michael, 1980. *People of Paradox: An Inquiry Concerning the Origins of American Civilization*. New York: Oxford University Press.
- Klach, Rebecca. 1991. "Complexities of Conservatism: How Conservatives Understand the World" in Wolfe, Allan (ed.). 1991. *America at Century's End*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Lee, Susan Previat & Peter Passell, 1979, *A New Economic View of American History*. New York: W.W. Norton & Company.
- Roosevelt, Elliott. 1991. *The President's Man*. New York: St. Martin's Press.
- Roosevelt, Franklin Delano. 1932. "Commonwealth Club Speech" in Hofstadter, Richard (ed.). *Great Issues in American History: A Documentary Record*. New York: Vintage Books.
- , 1937. "Radio Address on Supreme Court Reform" in Hofstadter, Richard (ed.). *Great Issues in American History: A Documentary Record*. New York: Vintage Books.
- Slotkin, Richard. 1985. *The Fatal Environment: The Myth of the Frontier on the Age of Industrialization, 1800-1890*. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.
- Sullivan, Patricia. 1996. *Days of Hope: Race and Democracy in the New Deal Era*. University of North Carolina Press.
- Thoreau, Henry David, 1993. *Walden and Other Writings*. Barnes & Noble Books.
- Tocqueville, Alexis de, 1945. *Democracy in America*. New York: Vintage Books.
- Todd, Lewis & Merle Curti, (eds.), 1972. *The Rise of American Nation*, third edition. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Turner, Frederick Jackson. 1963. *The Significance of Frontier in American History*. University of Arizona Press.
- Ver Steeg, Clarence and Hofstadter, R., 1978. *A People and A Nation*. New York: Harper & Row Publisher.
- White, William Allan, 1939, *The Changing West*. New York: The Macmillan Company.